



PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

TAHUN 2025-2029
RENCANA STRATEGIS

DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS	9
2.1 Gambaran Pelayanan BKPSDM Tapin.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPSDM	9
2.1.2 Sumber Daya BKPSDM.....	15
2.1.3 Kinerja Penyelenggara Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.2 Permasalahan	17
2.3 Penentuan Isu-isu Strategis	18
2.4 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Tapin	18
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, dan ARAH KEBIJAKAN	21
3.1 Tujuan dan Sasaran	21
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) sekarang ini merupakan isu utama dalam pengelolaan administrasi publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat yang direspon pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terukur dan terarah. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berlandaskan pada *TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada PERPRES No. 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam PERMENPAN-RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Perubahan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39), maka Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah. Rencana

strategis yang disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan tahunan agar yang dirumuskan efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan yang memuat tujuan, sasaran, program dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban di bidang Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin 2025-2030, sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2045;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Undang – Undang Kepegawaian Nomor 20 Tahun 2024, Tentang Aparatur Sipil Negara.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
29. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 36. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 37. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 38. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
 39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin adalah sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan, strategi, program dan sasaran yang ingin dicapai dan sebagai acuan melaksanakan Manajemen Kepegawaian Kabupaten Tapin selama 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka mendorong pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai tujuan daerah;
2. Menjadi acuan resmi bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut dengan sumber dana APBD.
3. Menjamin terwujudnya sinergi dan integrasi dalam proses penyusunan dan penetapan, serta implementasi program dan kegiatan antar bidang – bidang di BKPSDM Kabupaten Tapin.
4. Sebagai landasan penetapan indikator kinerja dalam rangka mengevaluasi kinerja setiap bidang di lingkungan BKPSDM Kabupaten Tapin.
5. Meningkatkan dan menjamin terwujudnya prinsip-prinsip tata-kelola pemerintahan yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tapin.
6. Terwujudnya aparatur pemerintahan yang berkualitas.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 ini berdasarkan sistematika sebagai

berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	I.1 Latar Belakang
	I.2 Dasar Hukum
	I.3 Maksud dan Tujuan
	I.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS
	2.1 Gambaran Pelayanan
	2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPSDM
	2.1.2 Sumber Daya BKPSDM
	2.1.3 Kinerja Penyelenggara Pelayanan BKPSDM Tapin
	2.2 Permasalahan
	2.3 Isu Strategis
	2.4 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran BKPSDM Tapin
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, dan ARAH KEBIJAKAN
	3.1 Tujuan dan Sasaran
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN dan KINERJA BKPSDM
	4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan BKPSDM Tapin

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pelayanan di Bidang Kepegawaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan Pegawai di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan-urusan yang dilaksanakan dimaksud juga mencakup tugas-tugas Pemerintah yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin sebagai unsur penunjang pada bidang Kepegawaian dituntut untuk mampu menyiapkan perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara daerah yang aspiratif, responsif, partisipatif, implementatif, efektif, realistis dan berorientasi pada masyarakat dan daerah, serta dapat bertanggung jawab.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPSDM

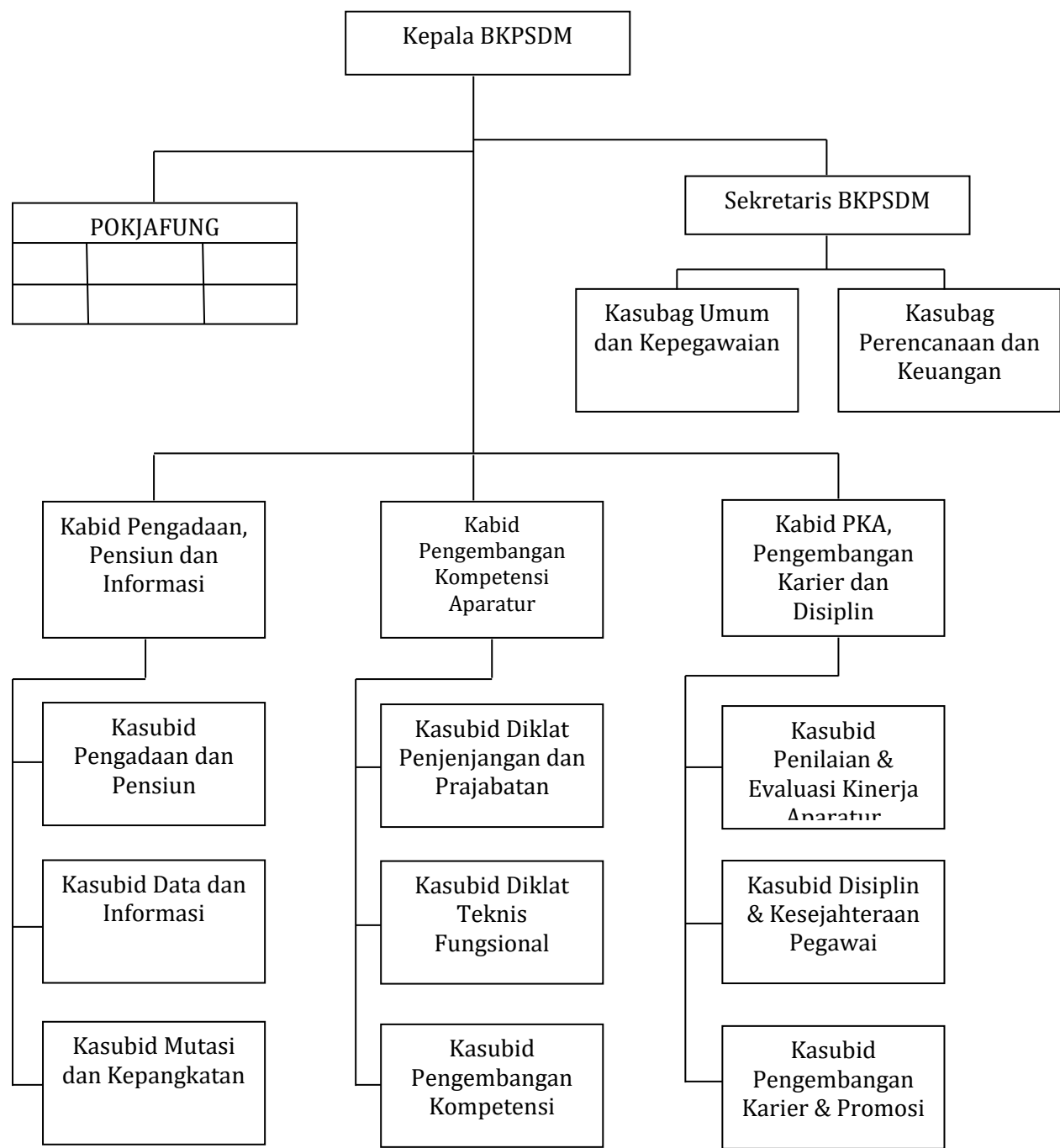
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin, maka tugas pokok BKPSDM adalah membantu Kepala daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan di Bidang Kepegawaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Pegawai di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya BKPSDM menyelenggarakan fungsi yakni:

- a.** mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah ;
- b.** mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan perencanaan pengembangan Kepegawaian Daerah ;
- c.** mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;

- d.** mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar & prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
- e.** mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan, menyiapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
- f.** mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- g.** mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan gaji tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan Norma Standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan ;
- h.** mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- i.** mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data dan informasi Kepegawaian Daerah ;
- j.** mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah antara lain melalui pendidikan dan pelatihan ;
- k.** mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyelenggaraan penyusunan program kerja Badan sesuai kebijakan Bupati dan perundang-undangan yang berlaku ;
- l.** mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyelenggaraan, penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol, surat-menyurat serta pembuatan laporan Badan ; dan
- m.** melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah maka dibentuklah Lembaga Organisasi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, maka susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin adalah :

Bagan Struktur Organisasi SKPD BKPSDM Kabupaten Tapin



Susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin merupakan koordinator utama dalam proses manajemen kepegawaian daerah.

2. Sekretariat BKPSDM

Dipimpin oleh Sekretaris, Sekretariat Memimpin Sekretariat mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian sesuai peraturan

yang berlaku untuk kelancaran dan pencapaian sasaran program Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin. **yaitu :**

- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian ;
- merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan perencanaan dan keuangan ;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Sekretariat terdiri dari:

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja dan anggaran, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan BKPSDM;

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas membantu Sekretaris mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, dan aset, humas dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

3. Bidang Pengadaan, Pensiun, dan Informasi

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi. Mempunyai tugas Memimpin Bidang dalam mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pengadaan, Pensiun, Informasi, serta Mutasi dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai peraturan yang berlaku untuk pencapaian sasaran program Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi.

Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi terdiri dari :

- a. Analis SDM Aparatur / Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun
- b. Analis SDM Aparatur / Sub Bidang Data dan Informasi
- c. Analis SDM Aparatur / Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan
 - a. Analis SDM Aparatur / Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Pengadaan dan Pensiun sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun. Jumlah pegawai 4 (empat) orang, yaitu :
 - a.1. Analis SDM Aparatur / Kasubbid Pengadaan dan Pensiun
 - a.2. Staf 3 (tiga) orang
 - b. Analis SDM Aparatur / Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi data dan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi. Jumlah pegawai 4 (empat) orang, yaitu:

- b.1. Analis SDM Aparatur / Kasubbid Data dan Informasi
- b.2. Staf 3 (tiga) orang
- c. Analis SDM Aparatur / Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Mutasi dan Kepangkatan sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan. Jumlah pegawai 4 (empat) orang, yaitu:
 - c.1. Analis SDM Aparatur / Kasubbid Mutasi dan Kepangkatan
 - c.2. Staf 3 (tiga) orang

4. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Memimpin Bidang dalam mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Prajabatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai peraturan yang berlaku untuk pencapaian sasaran program Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur terdiri dari :

- a. Analis SDM Aparatur / Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Prajabatan
- b. Analis SDM Aparatur / Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
- c. Analis SDM Aparatur / Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
 - a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Prajabatan mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan prajabatan sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Prajabatan. Jumlah pegawai 3 (tiga) orang, yaitu :
 - a.1. Analis SDM Aparatur / Kasubbid Penjenjangan dan Prajabatan.
 - a.2. Staf 2 (dua) orang
 - b. Analis SDM Aparatur / Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional. Jumlah pegawai 2 (dua)

orang, yaitu :

b.1. Analis SDM Aparatur / Kasubbid Diklat Teknis dan Fungsional

b.2. Staf 1 (satu) orang

- c. Analis SDM Aparatur / Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi. Jumlah pegawai 2 (dua) orang, yaitu :

c.1. Analis SDM Aparatur / Kasubid Pengembangan Kompetensi

c.2. Staf 1 (satu) orang

5. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karier, dan Disiplin

Dipimpin oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karier, dan Disiplin, mempunyai tugas Memimpin Bidang dalam mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pengembangan karier dan promosi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai peraturan yang berlaku untuk pencapaian sasaran program Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karier dan Disiplin.

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karier, dan Disiplin terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- b. Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
- c. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi
 - a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Penilaian dan evaluasi Kinerja ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja. Jumlah pegawai 2 (dua) orang yaitu :

a.1. Analis SDM Aparatur / Kasubbid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

a.2. Staf 1 (satu) orang

- b. Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan

- Pegawai. Jumlah pegawai 3 (tiga) orang, yaitu :
 - b.1. Analis SDM Aparatur / Kasubbid Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
 - b.2. Staf 2 (dua) orang.

- c. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi mempunyai tugas Memimpin Sub Bidang dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan karier dan promosi jabatan ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk pencapaian sasaran kegiatan Sub Bidang Pengembangan karier dan Promosi. Jumlah pegawai 3 (tiga) orang, yaitu :
 - c.1. Analis SDM Aparatur / Kasubbid Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
 - c.2. Staf 2 (dua) orang.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BKPSDM Kabupaten Tapin memiliki 7 (tujuh) orang yang mengisi Jabatan Fungsional yang semuanya adalah Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

2.1.2 Sumber Daya BKPSDM

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin merupakan akumulasi dari berbagai berbagai tingkat pendidikan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, pangkat, golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan, sebagai berikut:

Jumlah ASN BKPSDM Menurut Pendidikan										
TINGKAT PENDIDIKAN										
SD	SLTP	SLTA	DI	DII	D III	DIV	S - 1	S - 2	S - 3	JUMLAH
	-	2	-	-	6	-	21	3	-	32

JUMLAH ASN MENURUT GOLONGAN / KEPANGKATAN

GOLONGAN / KEPANGKATAN																
I				II				III				IV				JUMLAH
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
-	-	-	-	2	-	1	1	9	3	6	7	1	1	1	-	32
Jumlah Pejabat Struktural : 7																

PERSONALIA (PEGAWAI) BERDASARKAN JUMLAH JABATAN / ESELON

JABATAN / ESELON			
NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1.	Kepala BKPSDM Kabupaten Tapin	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kabid	III.b	3
3.	Kepala Sub Bagian / Sub Bidang / Jabatan Fungsional Penyetaraan	IV.a	20

2.1.3 Kinerja Penyelenggara Pelayanan Perangkat Daerah

Perkembangan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dimana nilai SAKIP maupun Indes Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan. Nilai SAKIP pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 70,00 dengan kategori BB dan Indeks Reformasi Birokrasi meningkat menjadi 55,00 dengan kategori C. Meskipun mengalami kenaikan, capaian ini masih memerlukan upaya dalam meningkatkan performa pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2017-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Sakip	B 67,23	B 67,93	B 69,69	B 68,93	BB 70
Nilai Reformasi Birokrasi	CC 51,65	CC 53,12	CC 53,94	CC 55,00	

2.2 Permasalahan

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi, BKPSDM Kabupaten Tapin mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan fungsi pelayanan kepegawaian SKPD.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik. Adapun permasalahan yang dihadapi tersebut adalah :

- a. Belum maksimalnya pelayanan berbasis digital.
- b. Pembaharuan data kediklatan ASN belum maksimal.
- c. Belum terbentuknya *talent pool* ASN.
- d. Rendahnya Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Kabupaten Tapin.
- e. Masih diperlukan peningkatan pembiayaan untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur.
- f. Masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepegawaian.

Dalam mengupayakan pembangunan yang efisien dan efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, maka dibutuhkan beberapa prinsip dasar yang dilaksanakan dalam pemerintahan yaitu *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Mencermati pelaksanaan "tata kelola pemerintahan yang baik" di Kabupaten Tapin, selama ini mengalami beberapa kendala diantaranya belum mapannya budaya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menunjang pencapaian sasaran pembangunan kabupaten, belum baiknya kualitas laporan kinerja perangkat daerah yang mampu menggambarkan analisis faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja secara komperhensif. dan belum jelasnya penjenjangan kinerja dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kabupaten.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tapin pada Tahun 2023 mencapai 53,94 meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, beberapa catatan dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi Kabupaten Tapin masih terlihat. Beberapa faktor utama terhambatnya pencapaian reformasi birokrasi, antara lain: pelaksanaan reformasi yang belum merata pada tingkat instansi pemerintahan, tata kelola SDM Aparatur yang belum secara keseluruhan menerapkan sistem merit, rendahnya kebijakan pengawasan internal dan integritas, serta penilaian kepuasan masyarakat yang terhadap layanan publik yang belum dilakukan secara berkala dan komperhensif.

Pada sisi pencapaian Nilai SAKIP, dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 Kabupaten

Tapin mengalami trend kenaikan. Keberhasilan peningkatan terjadi dikarenakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja, namun disisi lain masih terdapat beberapa kendala yang perlu diantisipasi, diantaranya penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja belum berorientasi pada hasil dan belum relevan sesuai dengan level jabatannya terutama pada level perangkat daerah. Selain itu, yang menjadi perhatian adalah keselarasan antar dokumen strategis pada level daerah maupun perangkat daerah dengan diikuti penjejangan kinerja yang belum terlaksana secara menyeluruh pada perangkat daerah di Kabupaten Tapin.

Jika dilihat dari poin-poin komponen penyusun nilai SAKIP, maka nilai SAKIP Kabupaten Tapin yang mencapai 69,69, secara menyeluruh belum memiliki nilai komponen yang memadai. Hal ini terlihat dari masih tingginya gap antara nilai komponen dengan bobot komponen. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Tapin sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitasnya. Selain itu, pencapaian indikator kinerja pencapaian SPM juga belum optimal dimana masih banyak realisasi SPM di bawah target nasional.

2.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini akan dipaparkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKPSDM Kabupaten Tapin yang menjadi fokus di periode tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang mengharuskan pelayanan publik berbasis digital;
- b. Adanya kebijakan pemerintah kabupaten tapin terkait peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT.
- c. Adanya penancangan dari pemerintah pusat tentang *core value* ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaaktif dan Kolaboratif).
- d. Pemerintah pusat mulai menggencarkan pembangunan sistem manajemen talenta ASN.
- e. Adanya kebijakan pemerintah pusat menjadikan IP-ASN sebagai standar profesionalitas aparatur.

2.4 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Tapin

Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin
Tahun 2019-2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		2019			2020			2021			2022			2023			Predikat Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Proyeksi	Tingkat Capaian	2019	2020	2021	2022	2023	
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	0	0	99	37,27	37,65	99	40,13	40,54	99	40,23	40,64	99	40,13	40,54	99	50	50,51	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	99
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	75	76	77	75	97,4	79	82,4	104,30	81	96,25	118,83	83	83,48	100,58	83	83,5	100,60	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	85

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD			Predikat Kinerja
			2024			2024
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Meningkatkan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kapasitas Manajemen ASN	Indeks Merit Sistem	0-0,4 Poin	0,01 (Nilai 84)	25%	Sangat Rendah
	Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Tapin	75 Poin	78,08 (Sedang)	104,1%	Sangat Tinggi
	Optimalisasi Pemetaan Talenta	Indeks Manajemen Talenta	60 Poin	20 Poin	33.33%	Rendah
	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Poin	87,75 Poin	97,5%	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tapin	Nilai SAKIP BKPSDM Kabupaten Tapin	75 Poin	73,00 (BB)	97,33%	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Profesionalisme ASN BKPSDM Kabupaten Tapin	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) BKPSDM Kabupaten Tapin	75 Poin	78,96 Poin	105,28%	Sangat Tinggi

Tabel Capaian Indikator Kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin
Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KEPEGAWAIAN							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	N/A	44,2%	5,04%	N/A	72,65%	81,33%
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	N/A	62,20%	11,22%	N/A	25,50%	32,33%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	N/A	40%	29,12%	N/A	48,04%	39,07%

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, dan ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin 2025-2029. Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh BKPSDM untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, 2025 sampai dengan tahun 2029. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

" Meningkatkan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah "

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Untuk mendukung perwujudan tujuan organisasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas penelitian dan pengembangan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin menetapkan sasaran strategis yakni, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kapasitas Manajemen ASN;
- b. Meningkatkan Kualitas ASN;
- c. Meningkatkan Kesesuaian Penempatan Talenta ASN;
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian ASN;
- e. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tapin;
- f. Meningkatkan Profesionalisme ASN BKPSDM Kabupaten Tapin.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis BKPSDM Kab. Tapin Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELAVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Manajemen ASN	Nilai Indeks NSPK	Nilai 174	175 Poin	176 Poin	177 Poin	179 Poin	180 Poin	181 Poin
		Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Kabupaten Tapin	78,08 (Sedang)	80 Poin	81 Poin	82 Poin	83 Poin	84 Poin	85 Poin
		Meningkatnya Kesesuaian Penempatan Talenta ASN	Persentase Talenta ASN yang Ditempatkan Sesuai Kompetensinya	80 Poin	82 Poin	84 Poin	86 Poin	88 Poin	90 Poin	92 Poin
		Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKPSDM Kabupaten Tapin	87,75 Poin	88 Poin	89 Poin	90 Poin	91 Poin	92 Poin	93 Poin
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tapin	Meningkatnya Nilai SAKIP BKPSDM Kabupaten Tapin	73 Poin	80	81	82	83	85	85
		Meningkatnya Profesionalisme ASN BKPSDM Kabupaten Tapin	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) BKPSDM Kabupaten Tapin	78,96 Poin	80 Poin	81 Poin	82 Poin	83 Poin	84 Poin	85 Poin

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Birokrasi menjadi instrument sebagai roda penggerak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara. Hal ini sebagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business proses*), dan sumber daya manusia aparatur. Dengan percepatan implementasi reformasi birokrasi diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi dalam melayani masyarakat menjadi lebih professional, efektif dan efisien.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024-2026 dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BKPSDM 2024- 2026 dan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas pada RPD 2025-2029.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah BKPSDM dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BKPSDM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Manajemen ASN	Meningkatkan Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN Kabupaten Tapin	Sebagai Perwujudan atau Peningkatan Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Profesional
	Meningkatnya Kualitas ASN	Mengoptimalkan peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN	Peningkatan kualifikasi aparatur pengelola dan efektivitas penggunaan anggaran pendukung
	Meningkatnya kesesuaian penempatan talenta ASN	Mengoptimalkan 5 tahapan komponen manajemen talenta yang meliputi akuisisi, pengembangan, retensi, penempatan serta monitoring dan evaluasi	Peningkatan kualifikasi aparatur pengelola dan efektivitas penggunaan anggaran pendukung
	Meningkatnya Pelayanan kepegawaian ASN	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan serta pemanfaatan layanan berbasis digital	Ketercukupan jumlah personil yang berkualitas dan memaksimalkan aplikasi pendukung untuk pelayanan administrasi kepegawaian
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tapin	Perbaikan Perencanaan Kinerja, Peningkatan Kualitas Pengukuran Kinerja, Optimalisasi Pelaporan Kinerja, dan Penguatan Evaluasi serta Akuntabilitas Kinerja	Dalam upaya untuk mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan
	Meningkatnya Profesionalisme ASN BKPSDM Kabupaten Tapin	Peningkatan Pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi, peningkatan kinerja, serta penegakan disiplin ASN	Sebagai pengukuran dan meningkatkan profesionalitas ASN melalui penilaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin

Tabel 3.3 Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kemajuan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN, dan memberikan pelayanan publik berkualitas. Definisi operasionalnya mencakup komponen penilaian yang dievaluasi oleh Kementerian PANRB untuk mengukur pencapaian tujuan reformasi birokrasi.	Kompilasi penilaian yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB	KemenPAN RB
Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya Kapasitas Manajemen ASN	Nilai Indeks NSPK	Indeks NSPK merupakan ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian ASN di instansi pemerintah	Kompilasi penilaian yang dikeluarkan dari Direktorat Pengawasan dan Pengendalian BKN RI	BKN RI
Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	IP-ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya Hasil Penilaian dari BKN	Kompilasi penilaian yang dikeluarkan dari Direktorat Pengawasan dan Pengendalian BKN RI	BKN RI
Meningkatnya kesesuaian penempatan talenta ASN	Persentase talenta ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya	Merupakan upaya menempatkan talent ASN kepada jabatan yang sesuai dengan syarat jabatan meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak, disiplin	Jumlah jabatan <i>dibagi</i> talent yang ditempatkan sesuai syarat jabatan <i>dikali</i> seratus	BKPSDM Tapin
Meningkatnya Pelayanan kepegawaian ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh layanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya – Kompilasi Nilai dari Hasil Survey Pelayanan	Kompilasi penilaian dari responden yang menerima pelayanan kepegawaian per triwulan selama satu tahun	BKPSDM Tapin

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka atau skor yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi serta capaian kinerja yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan oleh satuan kerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD = (P1x30%) + (P2x10%) + (P3x15%) + (P4x10%) + (P5x35%) Keterangan : - P1 = Nilai Perencanaan Kinerja - P2 = Nilai Pengukuran Kinerja - P3 = Nilai Pelaporan Kinerja - P4 = Nilai Evaluasi Kinerja Internal - P5 = Nilai Capaian Kinerja (Outcome)	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat
Meningkatnya Profesionalisme ASN BKPSDM Kabupaten Tapin	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) BKPSDM Kabupaten Tapin	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan.	Merupakan kompilasi nilai atau bobot dari setiap indikator (bobot nilai kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN)	BKPSDM Tapin

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2023 sampai dengan 2029, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan. Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD. Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2

serta rincian subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03 - KEPEGAWAIAN					10.463.357.780		11.096.468.611		11.637.347.781		12.203.860.245		12.797.307.674	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.493.658.180		8.126.769.011		8.667.648.181		9.234.160.645		9.827.608.074	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan Kinerja (Nilai)	26	26	27	80.000.000	27	80.000.000	28	80.000.000	29	80.000.000	30	80.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Dengan Satuan:LAPORAN) (Laporan)	73	80	83		87		91		91		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	22,2	26	26		27		27		28		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,55	12	13		13		13		14		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	15,25	16	17		18		19		20		21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	4.532.705.540	100	5.165.816.371	100	5.706.695.541	100	6.273.208.005	100	6.866.655.434	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Pelayanan BKPSDM Tapin dan Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Nilai Point Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Point) (poin)	87	88	89	2.880.952.640	90	2.880.952.640	91	2.880.952.640	92	2.880.952.640	93	2.880.952.640	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	92	92	93		94		95		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.969.699.600		2.969.699.600		2.969.699.600		2.969.699.600		2.969.699.600	
Meningkatnya Kompetensi ASN	IKM Pelayanan Dokumen Kepegawaian Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur (Dengan Satuan:Point) (poin)	85	85	86	116.000.000	87	116.000.000	88	116.000.000	89	116.000.000	90	116.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Persentase ASN dengan kualifikasi pendidikan meningkat (%)	10	20	20	1.429.899.600	20	1.429.899.600	25	1.429.899.600	25	1.429.899.600	30	1.429.899.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). (Dengan Satuan:Nilai) (poin)	85	85	86	1.423.800.000	87	1.423.800.000	88	1.423.800.000	89	1.423.800.000	90	1.423.800.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	
Meningkatnya Akuisisi Talenta ASN	Persentase ASN yang sudah diasessen (%)	0	0	0	950.000.000	0	950.000.000	0	950.000.000	0	950.000.000	0	950.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengembangan dan Retensi Talenta ASN	Persentase Kesesuaian Talenta ASN dengan kebutuhan Jabatan (%)	0	0	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
TOTAL KESELURUHAN					11663357780.00		12296468611.00		12837347781.00		13403860245.00		13997307674.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
- meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Nilai RB General (Angka)		
		Meningkatnya kapasitas Manajemen ASN			Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (Nilai)		
			Meningkatnya Akuisisi Talenta ASN		Persentase ASN yang sudah diasesmen (%)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Pengembangan dan Retensi Talenta ASN		Persentase Kesesuaian Talenta ASN dengan kebutuhan Jabatan (%)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Meningkatnya Kualitas ASN	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
			Meningkatnya Akuisisi Talenta ASN	Meningkatnya Kualitas ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
			Meningkatnya Pengembangan dan Retensi Talenta ASN	Meningkatnya Kualitas ASN	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	5.04.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Akuisisi Talenta ASN	Meningkatnya Kualitas ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
			Meningkatnya Kualitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
			Meningkatnya Kompetensi ASN		IKM Pelayanan Dokumen Kepegawaian Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur (Dengan Satuan:Point) (poin)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN		Persentase ASN dengan kualifikasi pendidikan meningkat (%)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatkan ASN Penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
				Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
				Meningkatkan ASN Penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
				Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	5.03.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	
			Meningkatnya Kompetensi ASN	Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
					Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
					Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
					Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	5.03.02.2.03.0014 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
		Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian	Meningkatnya Pelayanan BKPSDM Tapin dan Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
					Nilai Point Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Point) (poin)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya urusan penunjang pada BKPSDM Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). (Dengan Satuan:Nilai) (poin)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
					Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01.0005 - Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN	
				Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tapin			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
				Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan Kinerja (Nilai)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Dengan Satuan:LAPORAN) (Laporan)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Meningkatnya Kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03 - KEPEGAWAIAN				10.463.357.780		11.096.468.611		11.637.347.781		12.203.860.245		12.797.307.674		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.493.658.180		8.126.769.011		8.667.648.181		9.234.160.645		9.827.608.074		
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Dengan Satuan:LAPORAN) (Laporan)	73	83	80.000.000	87	80.000.000	91	80.000.000	91	80.000.000	96	80.000.000	5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Nilai Komponen AKIP- Perencanaan Kinerja (Nilai)	26	27		27		28		29		30			
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	22,2	26		27		27		28		30			
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,55	13		13		13		14		15			
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	15,25	17		18		19		20		21			
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	8	65.000.000	8	65.000.000	8	65.000.000	8	65.000.000	8	65.000.000		
5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	8	65.000.000	8	65.000.000	8	65.000.000	8	65.000.000	8	65.000.000		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
Meningkatnya Kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	4.532.705.540	100	5.165.816.371	100	5.706.695.541	100	6.273.208.005	100	6.866.655.434		
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.532.705.540		5.165.816.371		5.706.695.541		6.273.208.005		6.866.655.434		
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	4.532.705.540	4	5.165.816.371	4	5.706.695.541	4	6.273.208.005	4	6.866.655.434		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	35		35		37		37		40			
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.512.705.540		5.145.816.371		5.686.695.541		6.253.208.005		6.846.655.434		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	35	4.512.705.540	35	5.145.816.371	37	5.686.695.541	37	6.253.208.005	40	6.846.655.434		
5.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
5.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
5.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
Meningkatnya Pelayanan BKPSDM Tapin dan Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Nilai Point Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Point) (poin)	87	89	2.880.952.640	90	2.880.952.640	91	2.880.952.640	92	2.880.952.640	93	2.880.952.640		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	92	93		94		95		95		96			
5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	120	120	110.000.000	120	110.000.000	120	110.000.000	120	110.000.000	120	110.000.000		
5.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	120	120	110.000.000	120	110.000.000	120	110.000.000	120	110.000.000	120	110.000.000		
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.879.000.000		1.879.000.000		1.879.000.000		1.879.000.000		1.879.000.000		
Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian ASN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.879.000.000	1	1.879.000.000	1	1.879.000.000	1	1.879.000.000	1	1.879.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12				12		12			
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000		
5.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				122.000.000		122.000.000		122.000.000		122.000.000		122.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	122.000.000	12	122.000.000		122.000.000	12	122.000.000	12	122.000.000		
5.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000		
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000		
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				651.952.640		651.952.640		651.952.640		651.952.640		651.952.640		
Terlaksananya urusan penunjang pada BKPSDM Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	651.952.640	12	651.952.640	12	651.952.640	12	651.952.640	12	651.952.640		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	145.000.000	12	145.000.000	12	145.000.000	12	145.000.000	12	145.000.000		
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				506.952.640		506.952.640		506.952.640		506.952.640		506.952.640		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	506.952.640	12	506.952.640	12	506.952.640	12	506.952.640	12	506.952.640		
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	240.000.000	40	240.000.000	40	240.000.000	40	240.000.000	40	240.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000		
5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	95.000.000	40	95.000.000	40	95.000.000	40	95.000.000	40	95.000.000		
5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2.969.699.600		2.969.699.600		2.969.699.600		2.969.699.600		2.969.699.600		
Meningkatnya Kompetensi ASN	IKM Pelayanan Dokumen Kepegawaian Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur (Dengan Satuan:Point) (poin)	85	86	116.000.000	87	116.000.000	88	116.000.000	89	116.000.000	90	116.000.000	5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN				1.545.899.600		1.545.899.600		1.545.899.600		1.545.899.600		1.545.899.600		
Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	100	100	116.000.000	100	116.000.000	100	116.000.000	100	116.000.000	100	116.000.000		
	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	20	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		
Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	20	20	38.000.000	20	38.000.000	20	38.000.000	20	38.000.000	20	38.000.000		
5.03.02.2.03.0014 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000		
Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	100	100	78.000.000	100	78.000.000	100	78.000.000	100	78.000.000	100	78.000.000		
Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Persentase ASN dengan kualifikasi pendidikan meningkat (%)	10	20	1.429.899.600	20	1.429.899.600	25	1.429.899.600	25	1.429.899.600	30	1.429.899.600		
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN				1.545.899.600		1.545.899.600		1.545.899.600		1.545.899.600		1.545.899.600		
Meningkatkan ASN Penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	10	10	404.899.600	10	404.899.600	10	404.899.600	10	404.899.600	10	404.899.600		
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				404.899.600		404.899.600		404.899.600		404.899.600		404.899.600		
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	10	10	404.899.600	10	404.899.600	10	404.899.600	10	404.899.600	10	404.899.600		
Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	3	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000		
5.03.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1.025.000.000		1.025.000.000		1.025.000.000		1.025.000.000		1.025.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	3	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000		
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). (Dengan Satuan:Nilai) (poin)	85	86	1.423.800.000	87	1.423.800.000	88	1.423.800.000	89	1.423.800.000	90	1.423.800.000		
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				640.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000		
Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	1	640.000.000	1	640.000.000	1	640.000.000	1	640.000.000	1	640.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)	150	150		150		150		150		150			
	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	3	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000		
5.03.02.2.01.0005 - Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)	150	150	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000		
5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000		
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				609.900.000		609.900.000		609.900.000		609.900.000		609.900.000		
Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3	3	609.900.000	3	609.900.000	3	609.900.000	3	609.900.000	3	609.900.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	700	700		700		700		700		700			
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN				1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000		
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1	1	1.900.000	1	1.900.000	1	1.900.000	1	1.900.000	1	1.900.000		
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				111.000.000		111.000.000		111.000.000		111.000.000		111.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	700	700	111.000.000	700	111.000.000	700	111.000.000	700	111.000.000	700	111.000.000		
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN				497.000.000		497.000.000		497.000.000		497.000.000		497.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3	3	497.000.000	3	497.000.000	3	497.000.000	3	497.000.000	3	497.000.000		
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				173.900.000		173.900.000		173.900.000		173.900.000		173.900.000		
Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	1	173.900.000	1	173.900.000	1	173.900.000	1	173.900.000	1	173.900.000		
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	3	3		3		3		3					
	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	50	50		50		50		50					
5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				88.000.000		88.000.000		88.000.000		88.000.000		88.000.000		
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	1	88.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000		
5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				12.900.000		12.900.000		12.900.000		12.900.000		12.900.000		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	50	50	12.900.000	50	12.900.000	50	12.900.000	50	12.900.000	50	12.900.000		
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN				73.000.000		73.000.000		73.000.000		73.000.000		73.000.000		
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	3	3	73.000.000	3	73.000.000	3	73.000.000	3	73.000.000	3	73.000.000		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Meningkatnya Akuisisi Talenta ASN	Persentase ASN yang sudah diasesmen (%)	0	0	950.000.000	0	950.000.000	0	950.000.000	0	950.000.000	0	950.000.000	5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Meningkatnya Kualitas ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	100	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000		
5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	100	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengembangan dan Retensi Talenta ASN	Persentase Kesesuaian Talenta ASN dengan kebutuhan Jabatan (%)	0	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000		
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Meningkatnya Kualitas ASN	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000		
5.04.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03 - KEPEGAWAIAN				10.463.357.780		11.096.468.611		11.637.347.781		12.203.860.245		12.797.307.674		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.493.658.180		8.126.769.011		8.667.648.181		9.234.160.645		9.827.608.074		
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Dengan Satuan:LAPORAN) (Laporan)	73	83	80.000.000	87	80.000.000	91	80.000.000	91	80.000.000	96	80.000.000	5.03.5.04.0.00.01.0 000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Nilai Komponen AKIP- Perencanaan Kinerja (Nilai)	26	27		27		28		29		30			
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	22,2	26		27		27		28		30			
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,55	13		13		13		14		15			
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	15,25	17		18		19		20		21			
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	8	65.000.000	8	65.000.000	8	65.000.000	8	65.000.000	8	65.000.000		
5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja SKPD			65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	8	65.000.000	8	65.000.000	8	65.000.000	8	65.000.000	8	65.000.000		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

5.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
Meningkatnya Kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	4.532.705.540	100	5.165.816.371	100	5.706.695.541	100	6.273.208.005	100	6.866.655.434		
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan SKPD			4.532.705.540		5.165.816.371		5.706.695.541		6.273.208.005		6.866.655.434		
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	4	4	4.532.705.540	4	5.165.816.371	4	5.706.695.541	4	6.273.208.005	4	6.866.655.434		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	35		35		37		37		40			
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan Asn SKPD			4.512.705.540		5.145.816.371		5.686.695.541		6.253.208.005		6.846.655.434		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	35	4.512.705.540	35	5.145.816.371	37	5.686.695.541	37	6.253.208.005	40	6.846.655.434		
5.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan SKPD			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
5.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		

5.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Analisis dan Prognosis SKPD			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
Meningkatnya Pelayanan BKPSDM Tapin dan Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Nilai Point Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Point) (poin)	87	89	2.880.952.640	90	2.880.952.640	91	2.880.952.640	92	2.880.952.640	93	2.880.952.640		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	92	93		94		95		95		96			
5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Kabupaten Tapin			110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	120	120	110.000.000	120	110.000.000	120	110.000.000	120	110.000.000	120	110.000.000		
5.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian			110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	120	120	110.000.000	120	110.000.000	120	110.000.000	120	110.000.000	120	110.000.000		
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat			1.879.000.000		1.879.000.000		1.879.000.000		1.879.000.000		1.879.000.000		
Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian ASN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.879.000.000	1	1.879.000.000	1	1.879.000.000	1	1.879.000.000	1	1.879.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12				12		12			
	5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Kualitas Peralatan dan Perlengkapan Kantor					210.000.000				210.000.000			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000		
5.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Kualitas Peralatan Rumah Tangga			25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Kualitas Bahan Logistik Kantor			122.000.000		122.000.000		122.000.000		122.000.000		122.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	122.000.000	12	122.000.000		122.000.000	12	122.000.000	12	122.000.000		
5.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu di BKPSDM			22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000		
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000		

5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Jasa Penunjang Urusan Kantor			651.952.640		651.952.640		651.952.640		651.952.640		651.952.640		
Terlaksananya urusan penunjang pada BKPSDM Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	651.952.640	12	651.952.640	12	651.952.640	12	651.952.640	12	651.952.640		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Daya Listrik dan Internet Kantor			145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	145.000.000	12	145.000.000	12	145.000.000	12	145.000.000	12	145.000.000		
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kantor			506.952.640		506.952.640		506.952.640		506.952.640		506.952.640		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	506.952.640	12	506.952.640	12	506.952.640	12	506.952.640	12	506.952.640		
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah			240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	240.000.000	40	240.000.000	40	240.000.000	40	240.000.000	40	240.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Kualitas Kendaraan Dinas serta terbayarkannya pajak tahunan			80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000		
5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Kualitas Peralatan dan Mesin lainnya			95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	95.000.000	40	95.000.000	40	95.000.000	40	95.000.000	40	95.000.000		
5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana gedung kantor			65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			2.969.699.600		2.969.699.600		2.969.699.600		2.969.699.600		2.969.699.600		

Meningkatnya Kompetensi ASN	IKM Pelayanan Dokumen Kepegawaian Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur (Dengan Satuan:Point) (poin)	85	86	116.000.000	87	116.000.000	88	116.000.000	89	116.000.000	90	116.000.000	5.03.5.04.0.00.01.000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang sudah terpetakan potensinya			1.545.899.600		1.545.899.600		1.545.899.600		1.545.899.600		1.545.899.600		
	Persentase ASN yang mencapai level kompetensi tinggi (7,8,9)													
	Persentase ASN yang bertahan dalam level kompetensi tinggi (7,8,9)													
Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	100	100	116.000.000	100	116.000.000	100	116.000.000	100	116.000.000	100	116.000.000		
	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	20	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase ASN yang meningkat kinerjanya			38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		
Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	20	20	38.000.000	20	38.000.000	20	38.000.000	20	38.000.000	20	38.000.000		
5.03.02.2.03.0014 - Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000		
Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	100	100	78.000.000	100	78.000.000	100	78.000.000	100	78.000.000	100	78.000.000		
Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Persentase ASN dengan kualifikasi pendidikan meningkat (%)	10	20	1.429.899.600	20	1.429.899.600	25	1.429.899.600	25	1.429.899.600	30	1.429.899.600		
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang sudah terpetakan potensinya			1.545.899.600		1.545.899.600		1.545.899.600		1.545.899.600		1.545.899.600		
	Persentase ASN yang mencapai level kompetensi tinggi (7,8,9)													
	Persentase ASN yang bertahan dalam level kompetensi tinggi (7,8,9)													
Meningkatkan ASN Penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	10	10	404.899.600	10	404.899.600	10	404.899.600	10	404.899.600	10	404.899.600		
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikan			404.899.600		404.899.600		404.899.600		404.899.600		404.899.600		
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	10	10	404.899.600	10	404.899.600	10	404.899.600	10	404.899.600	10	404.899.600		
Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen	3	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000		
5.03.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Meningkatnya ASN yang lulus diklat jabatannya			1.025.000.000		1.025.000.000		1.025.000.000		1.025.000.000		1.025.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	3	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000	3	1.025.000.000		
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). (Dengan Satuan:Nilai) (poin)	85	86	1.423.800.000	87	1.423.800.000	88	1.423.800.000	89	1.423.800.000	90	1.423.800.000		
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat			640.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000		
Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	1	640.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)	150	150		150		150		150		150			
	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Meningkatnya kualitas dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Indeks kepuasan pelamar CASN			450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	3	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000		
5.03.02.2.01.0005 - Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Persentase terbitnya SK Pensiun tepat waktu			75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)	150	150	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000		
5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya lembaga profesi ASN (KORPRI)			55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000		
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian ASN			15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian	Meningkatnya kualitas data ASN			30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	Indeks kepuasan masyarakat			609.900.000		609.900.000		609.900.000		609.900.000		609.900.000		
Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3	3	609.900.000	3	609.900.000	3	609.900.000	3	609.900.000	3	609.900.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	700	700		700		700		700		700			
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	Terbitnya SK Mutasi ASN tepat waktu			1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000		
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1	1	1.900.000	1	1.900.000	1	1.900.000	1	1.900.000	1	1.900.000		
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terbitnya SK Pangkat ASN tepat waktu			111.000.000		111.000.000		111.000.000		111.000.000		111.000.000		

Tertaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	700	700	111.000.000	700	111.000.000	700	111.000.000	700	111.000.000	700	111.000.000		
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN	Persentase talenta ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya			497.000.000		497.000.000		497.000.000		497.000.000		497.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3	3	497.000.000	3	497.000.000	3	497.000.000	3	497.000.000	3	497.000.000		
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN dengan Nilai SKP kategori Baik			173.900.000		173.900.000		173.900.000		173.900.000		173.900.000		
Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	1	173.900.000	1	173.900.000	1	173.900.000	1	173.900.000	1	173.900.000		
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	3	3		3		3		3					
	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	50	50		50		50		50					
5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memahami Sasaran Kinerja			88.000.000		88.000.000		88.000.000		88.000.000		88.000.000		
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	1	88.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000		
5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			12.900.000		12.900.000		12.900.000		12.900.000		12.900.000		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	50	50	12.900.000	50	12.900.000	50	12.900.000	50	12.900.000	50	12.900.000		
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN	Persentase ASN yang memahami Peraturan Perundang-undangan kepegawaian			73.000.000		73.000.000		73.000.000		73.000.000		73.000.000		
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	3	3	73.000.000	3	73.000.000	3	73.000.000	3	73.000.000	3	73.000.000		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas ASN			1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Meningkatnya Akuisisi Talenta ASN	Persentase ASN yang sudah diasesmen (%)	0	0	950.000.000	0	950.000.000	0	950.000.000	0	950.000.000	0	950.000.000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang Lulus Diklat Jabatannya			1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Meningkatnya Kualitas ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	100	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000		
5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mencapai level kompetensi tinggi (7,8,9)			950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		

Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	100	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	
--	--	-----	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengembangan dan Retensi Talenta ASN	Persentase Kesesuaian Talenta ASN dengan kebutuhan Jabatan (%)	0	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000		
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang Lulus Diklat Jabatannya			1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Meningkatnya Kualitas ASN	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000		
5.04.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang Lulus Diklat Jabatannya			250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029. Untuk tahun tahun mendatang periode pembangunan 2025-2029, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Tapin yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan :

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Tapin yang termuat dalam Bab IV Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Tapin 2023-2029.

Indikator kinerja sasaran (impact) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Tapin pada Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Indikator kinerja program (outcome) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Tapin pada Bab IV. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin dengan target sampai dengan Tahun 2030 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Tapin

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Indeks NSPK	Poin	Nilai 174	175 Poin	176	177	179	180	181
2	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Kabupaten Tapin	Poin	78,08 (Sedang)	80	81	82	83	84	85
3	Persentase talenta ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya	Poin	80	82	84	86	88	90	92
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKPSDM Kabupaten Tapin	Poin	87,75 Poin	88	89	90	91	92	93
5	Meningkatnya Nilai SAKIP BKPSDM Kabupaten Tapin	Poin	73 Poin	80	81	82	83	85	85
6	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) BKPSDM Kabupaten Tapin	Poin	78,96 poin	80	81	82	83	84	85

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Rancangan Renstra Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam rancangan renstra Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dikendalikan oleh Kepala Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin, serta diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja yang menjadi tanggungjawabnya.
- Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami dinamika perubahan maka Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2025- 2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan- perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran di lingkup Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 sangat diharapkan.

- Pengendalian dan evaluasi Rancangan Renstra Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik
- Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan/atau perencanaan pembangunan periode berikutnya

Semoga Renstra Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, secara konsisten dalam rangka mendukung perencanaan dan pembangunan daerah.



IDENTIFIKASI DAN ANALISA RISIKO KECURANGAN

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapin

Instansi	No	Tahapan Proses Bisnis	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak Terkait	Jenis Risiko Kecurangan	Pemilik Risiko	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Pengendalian Terpasang	Risiko Saat Ini (current risk)			Respon Terhadap Risiko Kecurangan
											Kemungkinan	Dampak	Status Risiko (Nilai)	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BKPSDM Tapin	1	Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Waktu pelaksanaan perjalanan dinas dan ASN serta PTT yang melaksanakan perjalanan dinas	BKPSDM Tapin	Perbuatan curang	BKPSDM Tapin	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perjalanan dinas yang berlaku	Adanya perjalanan dinas fiktif dan waktu pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan Surat Tugas yang telah diberikan	Verifikasi SPJ yang lebih detail dan terperinci oleh PPTK	2	2	4	Memberikan pemahaman kepada ASN dan PTT BKPSDM Tapin tentang peraturan perjalanan dinas yang berlaku dan menambahkan dokumentasi pada setiap pelaksanaan perjalanan dinas
BKPSDM Tapin	2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan DPA Tahun berjalan dan harga yang tertuang pada SHS	Pihak BKPSDM Tapin melakukan negosiasi perihal jenis barang yang ingin dibeli dan harga yang diminta dengan pihak penyedia sebelum proses e-katalog dilaksanakan	Pejabat Pengadaan, PPTK dan PPK BKPSDM Tapin serta Penyedia	Perbuatan curang	BKPSDM Tapin	Kurangnya koordinasi pada saat penyusunan DPA khususnya dalam hal rencana pembelian barang atau penyediaan jasa pada tahun berjalan dan kurang update nya terhadap harga pasaran yang berlaku pada tahun berjalan	Adanya barang yang dibeli tidak sesuai dengan peruntukannya, harga yang di markup untuk menutupi harga barang lain yg lebih rendah dari harga pasaran	Verifikasi SPJ yang lebih detail dan terperinci oleh PPTK	2	2	4	Adanya edukasi tentang proses pengadaan barang dan jasa dilingkungan BKPSDM Tapin dan adanya koordinasi pada saat penyusunan DPA dan RKBMd khususnya dalam rencana pengadaan barang dan jasa
BKPSDM Tapin	3	Pelaksanaan Pengangkatan CASN, Pemindahan dan Pemberhentian ASN, Kenaikan Pangkat PNS, Pensiun PNS , Pengembangan Karir, Kenaikan Gaji Berkala, Izin Belajar, Tugas Belajar	Adanya pemberian imbalan kepada pegawai dalam proses Pengangkatan CASN, Pemindahan dan Pemberhentian ASN, Kenaikan Pangkat PNS, Pensiun PNS , Pengembangan Karir, Kenaikan Gaji Berkala, Izin Belajar, Tugas Belajar	Adanya seorang PNS/ASN memberikan sejumlah imbalan sebelum/sesudah memasukan berkas Pengangkatan CASN, Pemindahan dan Pemberhentian ASN, Kenaikan Pangkat PNS, Pensiun PNS , Pengembangan Karir, Kenaikan Gaji Berkala, Izin Belajar, Tugas Belajar dengan harapan urusan lebih dipermudah/agar berkas cepat selesai, atau sebagai ucapan terimakasih	PNS/ASN, Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi, Bidang PKA, Bangrier dan Disiplin	Gratifikasi, suap menyuap	BKPSDM Tapin	PNS/ASN ingin proses lebih cepat, kurang pengetahuan tentang prosedur resmi yang telah ditetapkan, budaya apresiasi	Enggan mengikuti prosedur resmi, menyelipkan uang/barang saat mengurus suatu layanan	Pemahaman lebih mendalam terkait aturan kepegawaian bagi unsur terkait, serta pelayanan sesuai SOP benar-benar diterapkan	2	2	4	Gunakan sistem "four eyes principle" (2 orang atau lebih harus terlibat dalam keputusan penting).

BKPSDM Tapin	4	Pelaksanaan Pembinaan Disiplin ASN	Penjatuhan hukuman disiplin ASN tidak sesuai ketentuan	Seseorang yang dijatuhi hukuman disiplin tidak ditindak sesuai dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku	ASN, Tim Pembina Kepegawaian (Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektorat, BKPSDM)	Gratifikasi, suap menyuap, pemerasan	Tim Pembina kepegawaian	ASN yang akan dijatuhi hukuman disiplin memberikan sejumlah imbalan atau dari pihak Tim Pembina Kepegawaian meminta sejumlah imbalan agar yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman disiplin	Ada kedekatan antara tim Pembina kepegawaian dan ASN yang akan dijatuhi hukuman disiplin	Pemahaman lebih mendalam terkait aturan kepegawaian bagi unsur terkait	2	2	4	Proses hukuman menyesuaikan dengan PP 94 Tahun 2021, Sosialisasi secara berkala kepada PPK dan bidang terkait
BKPSDM Tapin	5	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Tidak ada laporan penyelesaian tugas belajar	PNS yang melaksanakan tugas belajar, setiap bulan/semester mendapatkan uang saku, namun pada saat yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas belajar tidak melaporkan kepada BKPSDM sehingga terus dilakukan pembayaran	PNS yang melaksanakan tugas belajar	Perbuatan curang	BKPSDM Tapin	Kurangnya komunikasi antara BKPSDM dengan PNS yang melaksanakan tugas belajar	PNS yang bersangkutan tidak kunjung selesai melaksanakan tugas belajar	Kewajiban surat keterangan tugas belajar setiap semester dari Universitas atau penyelenggara pendidikan sebagai dasar Spj	2	2	4	Edukasi bagi PNS yang akan melaksanakan tugas belajar

Rantau, 29 Juli 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPIN



Gusti Ridha Jaya Wardana, S.Sos
NIP. 19681009 199010 1 001

